

Abstrak

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di Negeri ini. Korupsi Indonesia bahkan sudah tergolong extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Salah satu bentuk korupsi yang sangat meresahkan ialah korupsi pada penyaluran dana hibah / bantuan sosial kepada masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada putusan Nomor 3038 K/Pid.Sus/2021, yang dimana dalam putusan tersebut dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi pada anggaran kegiatan hibah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada perkara nomor 3038/K/Pid.Sus/2021 serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yuridis normatif ialah metode yang diterapkan pada riset ini. Penerapan pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 3038 K/Pid.Sus/2021 kepada Terdakwa IMAM HANAFI, S.e telah sesuai dengan fakta bahwa terdakwa merupakan seorang yang ditugaskan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk mengkoordinir 5 Kelompok yang akan menerima dana hibah uang untuk membeli hewan ternak. Bahwa hakim dalam memutus perkara menimbang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Tindak Pidana, Peternakan

Abstract

One of the criminal acts that is always in the spotlight in Indonesia is the problem of corruption. Corruption is nothing new in this country. Indonesian corruption is even classified as an extra ordinary crime. One form of corruption that is very disturbing is corruption in the distribution of grants/social assistance funds to the community. As happened in decision Number 3038 K/Pid.Sus/2021, where the decision stated that there had been a criminal act of corruption in the grant activity budget of the East Java Province Livestock Service Service in 2016. The aim of this research is to find out how the Law is implemented -The Law on the Eradication of Corruption Crimes in case number 3038/K/Pid.Sus/2021 and how the judge considers this case. The normative juridical method is the method applied in this research. The application of Article 2 Paragraph 1 of the Corruption Eradication Law in Decision Number 3038 K/Pid.Sus/2021 to the Defendant IMAM HANAFI, S.e is in accordance with the fact that the defendant is a person assigned by the East Java Province Animal Husbandry Service to coordinate 5 groups that will receive grant money to buy livestock. That the judge in deciding the case considers the defendant's actions as having fulfilled the criminal elements in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: Corruption, Crimanal Act, Farm